

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

Nomor SOP OT.01.02-063-079.Set.KumSidhal Tanggal Pembuatan Kamis, 14 Desember 2017 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Rabu, 02 Mei 2018 Disahkan oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Sidiq Mustofa, S.E., M.M. NRP. 9582/P

Kerja Sama

Penyiapan Bahan Rencana Pemberian Dukungan Administrasi

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki pengetahuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Mampu menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dengan baik dan akuntabel 3. Mampu berkoordinasi, kerja sama dan berkomunikasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet	
 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam Mampu menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dengan baik dan akuntabel Mampu berkoordinasi, kerja sama dan berkomunikasi dengan baik 	
No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 2. Mampu menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dengan baik dan akuntabel 3. Mampu berkoordinasi, kerja sama dan berkomunikasi dengan baik	
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 3. Mampu berkoordinasi, kerja sama dan berkomunikasi dengan baik	
Kerja Kemenko Polhukam 3. Mampu berkoordinasi, kerja sama dan berkomunikasi dengan baik	
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 4. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet	
SOP AP di Kemenko Polhukam dengan baik	
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di	
Kemenko Polhukam	
Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:	
1. SOP Makro Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi Kerja Sama 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi	
2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)	
3. Mesin Fotokopi	
4. Telepon, Faksimile, dsb	
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pemberian Disimpan dalam data elektronik dan manual	
dukungan administrasi kerja sama	

Judul SOP Mikro

SOP Mikro Penyiapan Bahan Rencana Pemberian Dukungan Administrasi Kerja Sama

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kabag Hublem dan Humas	Kasubbag Hubungan K/L	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mempelajari data usulan rencana sebelumnya yang belum terealisasi dan usulan rencana tahun berjalan kemudian menugaskan Kasubbag Hubungan Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan bahan				Arahan Karo	10 Menit	Disposisi/arahan Kabag Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat	
2	Menyiapkan alat pendukung terkait rencana pemberian dukungan aministrasi kerja, kemudian menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data dukung				Disposisi/arahan Kabag Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat	60 Menit	Bahan-bahan + jadwal rencana pelaksanaan	
3	Menyiapkan dan mengumpulkan data dukung dalam rangka penyusunan bahan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama			_	Bahan-bahan + jadwal rencana pelaksanaan	1 Hari	usulan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama	
4	Melakukan reviu teknis terhadap kelengkapan data dukung usulan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama				usulan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama	30 Menit	usulan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama + reviu teknis data dukung	
5	Menyiapkan bahan terkait rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama kemudian menyampaikannya kepada Kabag Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat		—————————————————————————————————————		usulan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama + reviu teknis data dukung	60 Menit	bahan terkait usulan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama	
6	Memeriksa usulan rencana untuk kemudian dijadikan materi dalam pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kerja sama				bahan terkait usulan rencana pemberian dukungan administrasi kerja sama	15 Menit	Materi pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kerja sama di Kemenko Polhukam	